



djpp

PMK-66/PMK.03/2022

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

www.pajak.go.id

Latar Belakang

2

Perlu menyesuaikan ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan Pupuk Tertentu sebagaimana diatur dalam PMK-62/PMK.03/2015 dengan adanya pengaturan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

www.pajak.go.id

POKOK-POKOK PENGATURAN

3

OBJEK	DPP PPN	TARIF PPN	Saat Pembuatan FP	LAIN-LAIN
<p>Pupuk Bersubsidi</p> <p>Bagian harga disubsidi → PPN dibayar Pemerintah</p> <p>Bagian harga tidak disubsidi → PPN dibayar pembeli</p> <p>Penyerahan oleh Produsen</p>	$\frac{100}{(100 + t)} \times \text{pembayaran subsidi}$ $\frac{100}{(100 + t)} \times \text{HET}$ <p>t = angka pada tarif PPN berlaku</p>	<p>Tarif PPN yang berlaku yaitu:</p> <p>a) 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;</p> <p>b) 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada saat berlakunya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.</p>	<p>Saat pengajuan permintaan pembayaran subsidi</p> <p>Saat penyerahan Pupuk Bersubsidi, atau saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.</p>	<p>Mekanisme pemungutan sekali oleh Produsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pajak Masukan bagi Produsen dapat dikreditkan; ➢ Pajak Masukan bagi Distributor /Pengecer tidak dapat dikreditkan.

DEFINISI PUPUK BERSUBSIDI

4

“

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian

”

DEFINISI NILAI LAIN

5

“

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak

”

www.pajak.go.id

DEFINISI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

6

“

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat **KPA**, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya

”

www.pajak.go.id

DEFINISI HARGA ECERAN TERTINGGI

7

“

Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga Pupuk Bersubsidi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian, untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV

”

www.pajak.go.id

PENGENAAN PPN

8



PPN dikenakan atas penyerahan:

Pupuk Bersubsidi oleh Pengusaha Kena Pajak

1x

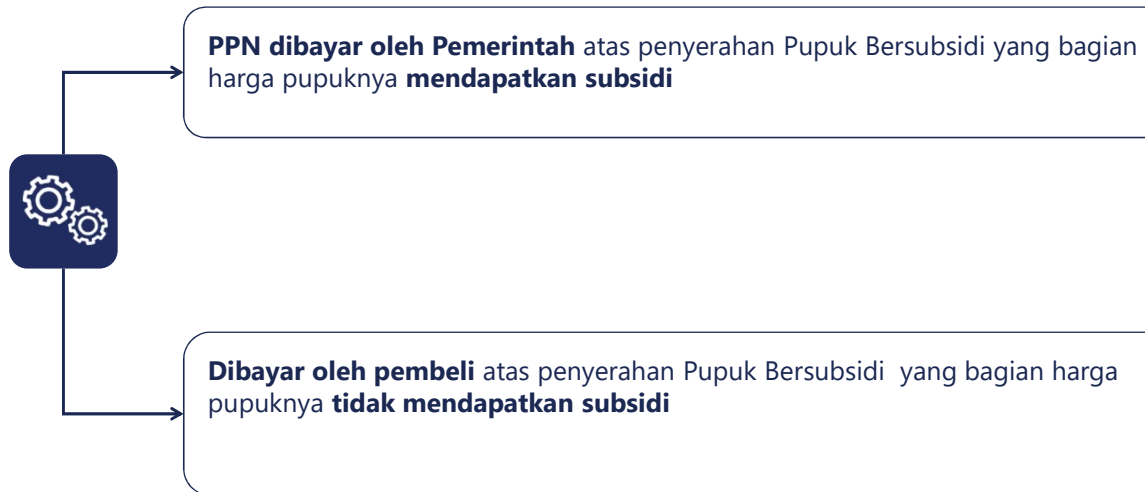
di tingkat **Produsen**

*



PERLAKUAN PENGENAAN PPN

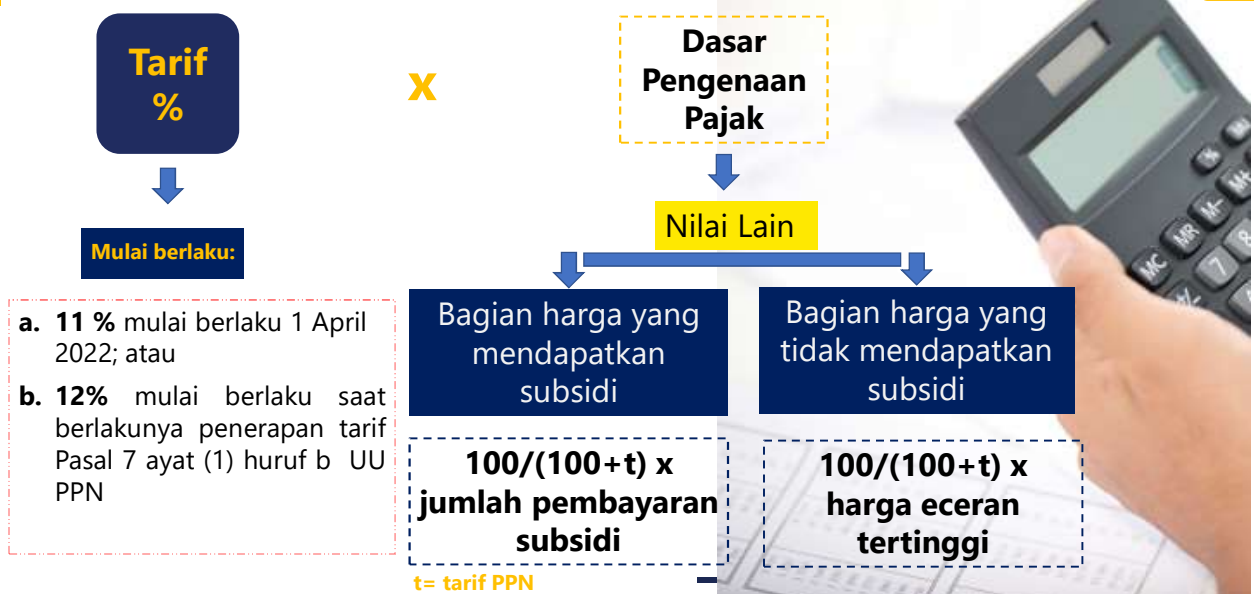
9



www.pajak.go.id

Perhitungan PPN

10



Kewajiban membuat faktur pajak

11

Produsen wajib membuat **Faktur Pajak**.

Saat Pembuatan Faktur Pajak

- Pada saat produsen **mengajukan permintaan pembayaran subsidi Pupuk Bersubsidi** kepada KPA; dan
- Pada saat produsen **menyerahkan Pupuk Bersubsidi kepada distributor**, atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan

11
www.pajak.go.id

Tata Cara Pengisian Faktur Pajak

12

Penyerahan Pupuk Bersubsidi yang **Bagian Harganya mendapatkan Subsidi**

Pengisian Faktur Pajak:

- Kode Transaksi 02
- Identitas PKP diisi nama, alamat, NPWP PKP Produsen
- Pembeli BKP/JKP diisi nama, alamat, NPWP DJA Kemenkeu
- Nomor urut BKP/JKP diisi nomor urut Pupuk Bersubsidi yang diserahkan
- Harga Jual diisi dengan nilai subsidi
- Dasar Pengenaan Pajak diisi Nilai Lain
- Pengisian kolom yang lain mengikuti ketentuan yang berlaku

12
www.pajak.go.id

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

13

Distributor dan Pengecer

dikukuhkan sebagai PKP jika :

- ✓ selain menyerahkan Pupuk Bersubsidi **juga menyerahkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak lainnya**

berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

tidak dikukuhkan sebagai PKP sepanjang usahanya hanya melakukan penyerahan Pupuk Bersubsidi



www.pajak.go.id

Pengkreditan Pajak Masukan

14

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan **penyerahan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, dapat dikreditkan** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan **oleh distributor dan pengecer tidak dapat dikreditkan**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	
Pengusaha Kena Pajak	
Nama : xxx	
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
NPWP : 07.773.220.9-502.000	
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa	
Nama : yyy	
Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy	
NPWP : 24.166.003.4-721.000	
No. : _____	Nama Barang Kena Pajak /
1	PRODUK KLM
	Rp. 5.000.000 x 3
Harga Jual / Penggantian	
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Utang Muka	
Dasar Pengenaan Pajak	
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	
Garis dengan kerangka yang berkode QR Code. Anda dapat mengontrol bahwa barang telah dibayar sesuai dengan data pada Faktur Pajak ini.	
	
<p>QR Code adalah barcode digital yang mengandung informasi barang yang dibeli, untuk dibaca dengan cara memasukkan QR Code melalui aplikasi yang memiliki fitur yang mendukung</p>	
www.pajak.go.id	

PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA

15



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 /PMK.03/2015

TENTANG

NILAI LAIN SEBAGAI PUNUK T DAN SAAT LAIN
DENGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



15
www.pajak.go.id

SAAT BERLAKU

16



Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK-66/PMK.03/2022 berlaku pada tanggal

1 April 2022

www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU



www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200

www.pajak.go.id